

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN TUNA SKALA KECIL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT; Penentuan Strategi Kemitraan dan Pola Bagi Hasil Optimal

Ramla Dula Saleh¹ dan Ruslan Tawari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted to formulate strategy of developing business small scale tuna fishing in West Regency Seram. More specifically this study aims to determine the partnership strategy between fishermen and owners of capital and optimal profit sharing patterns for both parties. The analysis method used is descriptive analysis, profit analysis, BEP and UMP optimization, and simulation for optimal results. The results show that the ideal partnership strategy is to put forward the proportionality, fairness, fortune and sustainability aspects with the optimal profit sharing formulation is 48: 52, for fishermen and capital owners respectively.

Keywords: Partnership Strategy, Profit Sharing, Tuna Fishing, Small Scale.

JEL Classification: L1, M39, Q22, Z21

PENDAHULUAN

Strategi pengembangan usaha pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan, mengoptimalkan keuntungan, serta menjamin keberlangsungan usaha. Salah satunya adalah dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bermitra.

Usaha penangkapan ikan tuna skala kecil di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah berlangsung cukup lama dengan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang masih tradisional dan mengedepankan kebiasaan atau kultur yang telah melembaga. Minimnya pengetahuan tentang teknologi produksi, strategi pemasaran dan skill pengelolaan usaha menyebabkan kemajuan usaha relatif tidak berkembang.

Hal ini ditambah dengan sistem kemitraan yang terbangun antara nelayan dengan pemilik modal yang masih didasarkan pada kebiasaan, telah menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan sulit beranjak, dan pada gilirannya kemiskinan nelayan terus saja menggurita di tengah berlimpahnya sumberdaya perikanan.

Secara umum terdapat dua pihak yang terlibat dalam sebuah usaha penangkapan ikan tuna di Kabupaten SBB, yakni nelayan dan pemilik modal (pemilik amada). Walaupun pola kerjasama yang dibangun bersifat kemitraan dengan pola bagi hasil keuntungan, namun dalam prakteknya nelayan selalu berada di pihak yang

sangat lemah dan terkesan berposisi sebagai pekerja (buruh), dimana sistem kerja sama serta pola bagi hasil ditentukan sepihak tanpa ada kontrak yang tegas.

Hal ini tentunya amat berpengaruh pada kesejahteraan dan kepastian pekerjaan bagi nelayan, sehingga pada gilirannya berdampak pada rendahnya etos kerja dan produktivitas secara keseluruhan.

Kondisi ini tentu saja berkonsekuensi pada tidak optimalnya pengelolaan usaha. Oleh karena itu diperlukan perbaikan yang serius dengan tetap memperhatikan potensi wilayah, kondisi sosial budaya, serta karakteristik nelayan setempat. Dalam perspektif tersebut maka kegiatan penangkapan ikan tuna di kabupaten SBB ini harus dipersiapkan dan diarahkan agar dapat memberikan nilai tambah yang secara ekonomis menguntungkan, secara teknis dapat dilaksanakan dan secara sosial dapat diterima oleh masyarakat

LANDASAN TEORITIS

Sumberdaya Ikan Tuna

Ikan tuna merupakan jenis kelompok ikan pelagis besar yang bersifat komersial. Ikan tuna terdiri dari jenis ikan tuna mata besar (*bigeye-Thunnus obesus*), madidihang (*yellowfin tuna-Thunnus albacares*), tuna albakora (*albacore tuna-Thunnus alabunga*), tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna-Thunnus maccoyii*), dan tuna abu-abu (*longtail tuna-Thunnus tonggol*). Sedangkan jenis tuna *exportable* yang tertangkap dari

perairan Indonesia diantaranya adalah madidihang atau *yellowfin tuna* (*Thunnus albacares*), tuna mata besar atau *bigeye tuna* (*Thunnus obesus*), albakora atau *albacore* (*Thunnus alalunga*) dan tuna sirip biru atau *bluefin tuna* (*Thunnus maccoyi*) (Wudianto dan Nikijuluw, 2003).

Madidihang atau *yellowfin tuna* (*Thunnus albacares*) termasuk tuna yang berukuran besar, bisa mencapai ukuran lebih dari 2 m. Para ahli perikanan menduga bahwa stok dari Samudera Pasifik dan stok dari Samudera Hindia bertemu di Indonesia, mungkin di sekitar Laut Flores dan Laut Banda. Tetapi bagaimana cara dan berapa lamanya ikan-ikan itu berbaur belum diketahui dengan pasti. Kalau pendapat ini benar, berarti perairan pedalaman Indonesia merupakan tempat berbaur madidihang dari dua samudera atau sebagai tempat melintasnya madidihang.

Madidihang hidup di perairan yang bersuhu 17-31°C, dengan suhu optimum berkisar 19-23°C (Nontji, 1993). Tuna mata besar atau *bigeye tuna* (*Thunnus obesus*) bisa mencapai panjang 2,30 m dan berat sampai 150 Kg. Ia mulai dewasa pada ukuran 0,9-1 m dan dapat mengandung telur sebanyak 2,8-3,6 juta butir. Sebaran ikan ini bersinambungan dari Samudera Pasifik melalui perairan diantara pulau-pulau Indonesia ke Samudera Hindia. Di Indonesia ikan ini banyak ditangkap di laut-laut dalam antara lain di perairan selatan Jawa, sebelah baratdaya Sumatera Selatan, Bali dan Nusa Tenggara, juga di Laut Banda dan Laut Maluku. Kadang-kadang juga tertangkap di perairan pantai (Nontji, 1993).

Tuna albakor atau *albacore tuna* (*Thunnus alalunga*) mempunyai ukuran dewasa sekitar 0,9 m. Kondisi suhu perairan juga berperan dalam sebarannya. Albakor yang berukuran kecil menyenangkan perairan dengan suhu rendah sedangkan ikan-ikan besar berada di perairan yang lebih

hangat. Di Indonesia penangkapan albakor banyak dilakukan di Samudera Hindia.

Tatihu atau *southern bluefin tuna* (*Thunnus maccoyi*) hanya hidup di belahan bumi selatan. Mulai dari lepas pantai Argentina, meluas ke Samudera Atlantik, Samudera Hindia, lepas pantai selatan Australia dan Selandia Baru hingga perairan Chili. Meskipun sebarannya amat luas, namun diperkirakan hanya ada satu stok saja dengan tempat pemijahan di wilayah terbatas yakni antara selatan Jawa dan Australia Barat-Laut sekitar lintang 10⁰-20⁰ LS dan bujur 100⁰-125⁰ BT.

Perikanan Skala Kecil

Skala usaha perikanan dapat dilihat dari berbagai aspek (Charles, 2001), di antaranya berdasarkan ukuran kapal yang dioperasikan, berdasarkan daerah penangkapan, dan berdasarkan tujuan produksinya. Pengelompokan tersebut dilakukan melalui perbandingan perikanan skala kecil (*small scale fisheries*) dengan perikanan skala besar (*large scale fisheries*).

Perairan pantai Indonesia secara historis adalah daerah penangkapan bagi perikanan rakyat (*artisanal fisheries*). Perikanan rakyat ini sejak tahun 1975 telah menghasilkan hampir seluruh (90%) produksi perikanan laut Indonesia (Soegiarto, 1976). Produksi perikanan laut meningkat 970 ribu ton pada tahun 1975 menjadi 3,6 juta ton pada 1997, dan menjadi 4,07 juta ton pada tahun 2002 (DJPT, 2004). Kenaikan produksi tersebut disebabkan antara lain modernisasi armada penangkapan dan adanya penemuan baru potensi ikan dan perluasan daerah penangkapan ikan. Meskipun demikian, daerah penangkapan perikanan rakyat yang merupakan ciri dominan perikanan Indonesia tetap terkonsentrasi di wilayah pesisir atau pantai.

Berkes *et al.* (2001) menjelaskan sejumlah karakteristik nelayan artisanal dibandingkan dengan nelayan industri sebagaimana tertera di Tabel (1).

Tabel (1). Kategori dan Dimensi Perikanan Berdasarkan Karakteristiknya

Karakteristik	Kategori perikanan		
	Skala Besar	Skala Kecil	Subsisten
Hubungan Perikanan (Industri)			
▪ Unit penangkapan	Stabil, dengan pembagian kerja dan peluang karir	Stabil, kecil, spesialisasi pembagian kerja	Sendiri, atau keluarga atau komunitas kelompok
▪ Kepemilikan	Bukan pelaku	Biasanya dimiliki oleh pelaku senior, atau pelaku gabungan	Pemiliknya si pelaku
▪ Komitmen waktu	Biasanya penuh waktu	Penuh atau paruh waktu	Paruh waktu
▪ Kapal	Bertenaga mesin, banyak peralatan	Kecil, motor dalam (atau motor tempel)	Kecil, biasanya tidak bermotor
▪ Tipe peralatan	Mesin, dirakit oleh pelaku	Sebagian atau semua materialmesin, dirakit oleh pelaku	Material buatan sendiri, dirakit oleh pelaku

▪ Alat tangkap	Elektronik, otomatis	Mekanik dan manual	Sebagian besar tidak mekanik
▪ Investasi	Tinggi, proporsi lebih besar dari pada oleh pelaku	Menengah ke rendah, seluruhnya oleh pelaku	Rendah
▪ Hasil tangkapan	Besar	Sedang ke rendah	Rendah ke sangat rendah
▪ Penjualan hasil tangkapan	Pasar yang terorganisir	Penjualan lokal, konsumsi signifikan oleh operator	Sebagian dikonsumsi oleh pelaku, keluarga dan sahabat, ditukar dengan barter, kadang-kadang dijual
▪ Pengolahan hasil tangkapan	Lebih banyak untuk tepung ikan dan bukan konsumsi manusia	Pengeringan, pengasapan, penggaraman, sebagian besar untuk konsumsi manusia	Sedikit atau tidak, semua untuk konsumsi manusia
▪ Tingkat pendapatan pelaku	Tinggi	Sedang	Minim (rendah)
▪ Integrasi ekonomi	Formal, integrasi penuh	Integrasi parsial	Informal, tidak terintegrasi
▪ Masa kerja	Penuh waktu atau musiman	Sering multi pekerjaan	Multi pekerjaan
▪ Luas pemasaran	Produk ditemukan diseluruh dunia	Nasional dan local	Lokal dan hanya tingkat daerah
▪ Kapasitas manajemen dari otoritas perikanan	Layak, dengan banyak ilmuwan dan manager	Minimal untuk moderat, dengan sedikit ilmuwan atau manager	Sering tidak dikelola kecuali oleh pengguna sumberdaya
▪ Unit manajemen	Satu atau beberapa unit besar	Biasanya banyak unit kecil	Sangat banyak unit kecil
▪ Pengumpulan data perikanan	Tidak terlalu sulit, ada kapasitas kekuasaan	Sulit dalam kaitan perikanan dan figur otoritas	Sering tidak ada data, pengumpulan data sulit dilakukan

Sumber: Berkes et al. (2001)

Pengembangan Perikanan Tangkap

Upaya pengelolaan dan pengembangan perikanan laut di masa mendatang memang akan terasa lebih berat sejalan dengan perkembangan IPTEK. Namun demikian, dengan pemanfaatan IPTEK itu pulalah kita diharapkan akan mampu mengatasi keterbatasan sumber daya melalui suatu langkah yang rasional untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Langkah pengelolaan dan pengembangan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek biologi, teknis, sosial budaya dan ekonomi (Barus et al. 1991).

Seleksi teknologi menurut Haluan dan Nurani (1988), dapat dilakukan melalui pengkajian pada aspek *bio-techno-socio-economy-approach*, oleh karena itu ada empat aspek yang harus dipenuhi oleh suatu jenis teknologi penangkapan ikan yang dikembangkan, yaitu: (1) jika di tinjau dari segi biologi tidak merusak atau mengganggu kelestarian sumber daya, (2) secara teknis efektif digunakan, (3) secara sosial dapat di terima masyarakat nelayan, dan (4) secara

ekonomi teknologi tersebut bersifat menguntungkan. Selanjutnya dikatakan bahwa satu aspek yang tidak dapat diabaikan adalah kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah.

Pengembangan jenis-jenis teknologi penangkapan ikan di Indonesia perlu diarahkan agar dapat menunjang tujuan-tujuan pembangunan umum perikanan, apabila hal ini dapat disepakati, maka syarat-syarat pengembangan teknologi penangkapan Indonesia haruslah dapat:

- (1) Menyediakan kesempatan kerja yang banyak.
- (2) Menjamin pendapatan yang memadai bagi para tenaga kerja atau nelayan.
- (3) Menjamin jumlah produksi yang tinggi.
- (4) Mendapatkan jenis ikan komoditi ekspor atau jenis ikan yang biasa diekspor.
- (5) Tidak merusak kelestarian SDI.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya pembangunan sub sektor perikanan tangkap, menurut DJPT (2005) merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan pada:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.
- Peningkatan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan kecerdasan dan kesehatan Bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan.
- Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan.
- Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.

Pembangunan perikanan tangkap dilakukan melalui upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan konsumsi, penerimaan devisa, dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, diidentifikasi bahwa tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah: (1) meningkatkan kesejahteraan nelayan; dan (2) menjaga kelestarian SDI dan lingkungannya.

Pembangunan perikanan tangkap ke depan dinilai cerah karena potensi dan prospek yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu : (1) luasnya perairan yang dimiliki (laut teritorial, laut nusantara dan ZEE), dan perairan umum (danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya); (2) potensi lestari ikan laut yang belum dikelola secara optimal; (3) potensi SDM nelayan yang melimpah yang belum dioptimalkan; (4) prospek pasar dalam dan luar yang cerah untuk produk-produk perikanan laut; (5) permintaan ikan untuk konsumsi dalam dan luar negeri sangat tinggi seiring meningkatnya jumlah penduduk; dan (6) kesadaran masyarakat akan pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang aman, sehat dan bebas kolesterol sehingga masyarakat beralih dari mengkonsumsi *red-meat* menjadi *white-meat* (DJPT 2004).

Menurut Monintja (2001), perikanan tangkap perlu dikelola dengan baik karena:

- (1) Perikanan tangkap berbasis pada sumber daya hayati yang dapat diperbaharui (*renewable*), namun dapat mengalami deplesi atau kepunahan. Sumber daya ikan (SDI) memiliki kelimpahan yang terbatas sesuai *carrying capacity* habitatnya.
- (2) SDI dikenal sebagai sumber daya milik bersama (*common property*) yang rawan terhadap upaya penangkapan lebih (*overfishing*).
- (3) Pemanfaatan SDI dapat merupakan sumber konflik (di daerah penangkapan ikan maupun dalam pemasaran hasil tangkapan).
- (4) Usaha penangkapan haruslah menguntungkan dan mampu memberi kehidupan yang layak bagi para nelayan. Jumlah nelayan yang melebihi kapasitas akan

menimbulkan kemiskinan para nelayan.

- (5) Kemampuan modal, teknologi dan akses informasi yang berbeda antar nelayan menimbulkan kesenjangan dan konflik.
- (6) Usaha penangkapan ikan dapat menimbulkan konflik dengan subsektor lainnya, khususnya dalam zona atau tata ruang pesisir dan laut.
Perikanan tangkap masih berpeluang untuk dikembangkan, namun di sisi lain masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan perikanan tangkap, antara lain (Barani 2004):

- Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif untuk suatu kemajuan.
- Struktur amada perikanan yang masih didominasi oleh skala kecil atau tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang rendah.
- Masih timpangnya tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya.
- Masih banyaknya praktek *illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing* yang terjadi karena penegakan hukum (*law enforcement*) di laut masih lemah.
- Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun (*seagrass bed*), yang merupakan tempat (*habitat*) ikan dan organisme laut lainnya berpijah (*spawning ground*), mencari makan (*feeding ground*), atau membesarkan diri (*nursery ground*).
- Masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, terutama oleh usaha tradisional sesuai dengan selera konsumen dan standardisasi mutu produk secara internasional (seperti *hazard analysis critical control point* atau HACCP, persyaratan sanitasi, dan lainnya).
- Lemahnya *market intelligence* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (*preference*) para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan.
- Belum memadainya prasarana ekonomi dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, terutama di luar Jawa dan Bali.

Ada pula kendala yang sangat mempengaruhi tingkat pendapatan dari para nelayan menurut Barani (2004) antara lain:

- (1) Terjadinya degradasi dan kerusakan sumber daya perikanan dan lingkungan diakibatkan oleh kegiatan perikanan (*destructive fishing*) maupun kegiatan non perikanan (penambangan karang, pencemaran, penebangan mangrove, dan sebagainya).
- (2) Semakin meningkatnya kasus pelanggaran jalur penangkapan ikan oleh kapal ikan berukuran besar yang secara langsung merugikan nelayan kecil.
- (3) Timbulnya konflik nelayan antar daerah dalam pemanfaatan *fishing ground*, terutama akibat dari pemahaman otonomi daerah yang berlebihan.
- (4) Terbatasnya prasarana pendukung sehingga menghambat kelancaran usaha nelayan.
- (5) Belum berkembangnya pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
- (6) Produktivitas dan efisiensi usaha relatif masih rendah, terutama akibat dari skala usaha yang masih kecil maupun posisi marginal nelayan dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive analysis* untuk mengulas secara deskriptif tentang penentuan strategi kemitraan yang ideal, serta Optimasi UMP dan BEP untuk merumuskan pola bagi hasil yang optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual

Pola Kemitraan yang terbangun antara nelayan dan pemilik modal di lokasi penelitian yang saat ini berlangsung secara umum dapat dikatakan berbentuk *patron-client*, namun masih di bawah manajemen pengelolaan kemitraan yang tradisional, sederhana, jauh dari penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik, serta sebagian besar masih berbasis kepercayaan. Hal ini jelas mengurangi efisiensi, optimalitas dan kesinambungan usaha.

Sistem kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini pemilik modal dengan nelayan, hanya berdasarkan kebiasaan, tanpa adanya kontrak yang jelas, demikian pula pola bagi hasil yang diterapkan. Kondisi tersebut amat berpotensi menimbulkan adanya ketidakadilan, ketidakpastian (*uncertainty*), serta pada akhirnya berpengaruh pada etos kerja, kinerja dan produktivitas nelayan itu sendiri.

Penentuan Strategi Kemitraan dan Sistem Bagi Hasil Optimal Strategi Kemitraan

Bentuk kemitraan yang terlalu sederhana tanpa adanya sebuah sistem dan aturan yang tegas untuk mengikat kedua belah pihak tentu saja berdampak pada tidak jelasnya pola kerja sama yang dibangun. Konsekuensi yang terjadi dapat berupa terbukanya ruang ketidakadilan, rendahnya produktivitas dan etos kerja, serta pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri.

Oleh karena itu pola kemitraan harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, berkeadilan, berkeuntungan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang ditegakkan dalam koridor kepentingan kedua pihak, dimana selanjutnya harus dapat diderivasi secara eksplisit ke dalam kontrak atau kesepakatan tertulis disertai adanya sanksi bagi tindakan-tindakan penyimpangan atau wanprestasi.

Prinsip proporsionalitas terkait dengan peranan relatif dari masing-masing pihak, termasuk resiko yang mungkin diterima dibandingkan dengan manfaat yang bisa diperoleh. Sedangkan prinsip berkeadilan terkait dengan bagaimana kedua pihak memposisikan diri mereka sebagai mitra yang sejajar. Prinsip berkeuntungan mengandung arti bahwa kerjasama dan kesepakatan yang dibangun jelas harus bermuara pada optimasi keuntungan bagi kedua pihak. Sementara prinsip berkelanjutan terkait dengan upaya optimasi yang tetap mengedepankan sustainability usaha.

Kemitraan yang dibangun tentu saja harus bermuara pada manfaat yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak. Dimana salah satu implikasinya adalah pembagian keuntungan atau bagi hasil yang memenuhi prinsip-prinsip dasar di atas, yakni sebagai berikut:

Menghitung Pola Bagi Hasil Optimal

Penentuan sistem bagi hasil usaha penangkapan ikan madidihang dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis diawali dengan membuat prosedur identifikasi, evaluasi dan analisis terhadap sistem bagi hasil yang selama ini berlaku di lokasi studi, dan selanjutnya mensimulasikan sistem bagi hasil yang ideal, dengan mempertimbangkan kepentingan nelayan di satu sisi, serta kepentingan pemilik pada sisi yang lain secara adil, proporsional, berkeuntungan dan berkelanjutan.

Adapun tahapan prosedur analisis sebagai berikut:

- 1). Menghitung pendapatan bersih unit penangkapan ikan dengan formula sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC \quad (1)$$

Dimana, π = pendapatan bersih unit penangkapan, TR = Total Penerimaan, TC = Total biaya (TC = FC + VC).

Perhitungan yang berlaku di lapangan (lokasi studi) menggunakan VC sebagai TC untuk setiap operasi. Mereka tidak menggunakan TC tapi VC dikarenakan komponen FC dianggap telah dikompensasi dalam *share* bagi hasil untuk pemilik. Sehingga estimasi profit bersih perbulan adalah sebesar:

$$\pi = 23.520.000 - 13.340.000 = 10.180.000$$

2). Menghitung break event point (BEP) unit penangkapan ikan dengan formula sebagai berikut: BEP terjadi pada satu titik (waktu atau unit produksi), dimana total penerimaan sama dengan total biaya (TR = TC).

A. Mendapatkan titik BEP

BEP diperoleh dengan rumus:

$$BEP = \frac{FC}{\text{Harga Jual per kg} - VC \text{ per kg}} \quad (2)$$

Asumsi:

- a. Harga jual per kg adalah Rp.42.000,-
- b. Dalam sebulan dihasilkan 560 kg
- c. Untuk menghitung BEP pemilik maka unsur bagi hasil untuk nelayan harus dihitung sebagai komponen VC. Karena dalam perspektif pemilik, secara keseluruhan, bagi hasil nelayan adalah komponen biaya yang jelas akan mengurangi keuntungannya.
- d. Maka VC per kg adalah $(13.340.000 + 4.072.000) / 560 = \text{Rp. } 30.892,86$

Maka BEP tercapai pada unit produksi sebesar:

$$BEP = \frac{1.345.000 (60)}{42.000 - 30.892,86} = 7.265,59 \text{ kg}$$

Dan jika dibagi dengan waktu maka BEP tercapai pada bulan ke:

$$\frac{7.265,59}{560} = 12,97$$

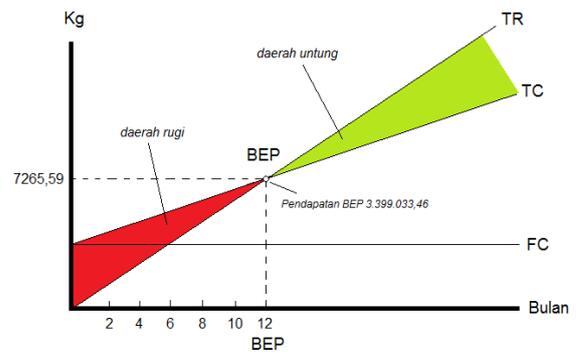
Artinya BEP tercapai pada produksi sebesar 7.265,59 Kg, atau pada akhir bulan ke-12.

B. Mendapatkan Pendapatan Bersih BEP (perbulan)

Setelah memperoleh titik waktu di mana BEP tercapai maka, selanjutnya adalah menghitung pendapatan BEP perbulan, dengan rumus:

$$BEP = \frac{\text{Total Investasi}}{1 \text{ Waktu BEP}} = \frac{44.100.000}{212,97} = \text{Rp. } 3.339.033,46$$

Jika digambarkan dalam grafik maka nampak sebagai berikut:



Gambar (1). Break Event Point

- 3). Menentukan bagian nelayan dan pemilik sesuai persentase sistem bagi hasil yang berlaku di lokasi studi.

$$\text{Bagi hasil nelayan} = 40\% \times \pi = 0,4 \times 10.180.000 = \text{Rp. } 4.072.000,-$$

Oleh karena dalam satu unit penangkapan minimal terdapat 2 orang nelayan, maka pendapatan bagi hasil di atas harus dibagi dengan 2 orang nelayan, sehingga masing-masing nelayan akan memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar Rp.2.036.000,-. Bagi hasil pemilik = $60\% \times \pi = 0,6 \times 10.180.000 = \text{Rp. } 6.108.000,-$

- 4). Mengevaluasi upah minimum provinsi (UMP) Maluku sektor perikanan tangkap berdasarkan SK Gubernur Maluku nomor 409 tahun 2011 sebesar Rp 1.145.000,- dengan mempertimbangkan faktor jumlah alokasi waktu kerja nelayan sebagai berikut:

$$UMP_2 = \frac{t_1}{t_2} \times UMP_1 \quad (3)$$

Dimana;

UMP_2 = Upah minimum provinsi ideal.

UMP_1 = Upah minimum yang berlaku, t_2 = waktu rata-rata yang dialokasikan nelayan, t_1 = waktu rata-rata yang dialokasikan untuk pekerja di darat $t_2 = 15$ jam sehari /5 hari kerja dalam seminggu /75 jam seminggu

$t_1 = 8$ jam sehari utk 5 hari kerja /40 jam seminggu /UU ketenagakerjaan maka,

$$UMP_2 = \frac{75}{40} \times 1.145.000 = 2.146.875$$

- 5). Menghitung pendapatan nelayan terendah berdasarkan sistem bagi hasil yang berlaku.

Bagi hasil 2 orang nelayan = $40\% \times \pi = 0,4 \times 10.180.000 = \text{Rp. } 4.072.000,-$ dibagi 2 orang nelayan menjadi Rp.2.036.000 untuk setiap nelayan.

- Sedangkan bagi hasil pemilik = $60\% \times \pi = 0,6 \times 10.180.000 = \text{Rp}.6.108.000,-$
- 6). Membandingkan UMP2 terhadap pendapatan nelayan dengan posisi terendah. Posisi terendah adalah 560 kg perbulan, hal ini berarti bahwa pendapatan nelayan saat ini < dari UMP2, sedangkan pendapatan pemilik modal saat ini > BEP.
- 7). Melakukan simulasi dengan pertimbangan pendapatan pemilik modal harus lebih besar dari BEP dan pendapatan nelayan juga harus lebih besar dari UMP2. Hasil simulasi bagi hasil sebagaimana diringkas pada tabel (2) di bawah ini :

Tabel (2). Simulasi Bagi Hasil

Pola Bagi Hasil	NELAYAN (1 orang)			PEMILIK		
	Pendapatan (Y) (Rp)	Perbandingan dengan UMP2	Ket.	Pendapatan (Y) (Rp)	Perbandingan dengan BEP	Ket.
<u>Saat ini</u> 40 : 60	1.980.000	Y < UMP2	Tidak ideal	5.940.000	Y > BEP	Ideal
<u>Simulasi I</u> 42,18 : 57,82	2.146.875	Y = UMP2	Layak tapi belum cukup	5.886.050	Y > BEP	Ideal
<u>Simulasi II</u> 66,61 : 33,39	3.390.483,27	Y > UMP2	Ideal	3.399.033,46	Y = BEP	ayak tapi belum cukup
<u>Simulasi III</u> 48 : 52	2.447.200	Y > UMP2	Ideal	5.293.600	Y > BEP	Ideal

Keterangan:

BEP = Rp.3.399.033,46, UMP2 = Rp.2.146.875,-

1. Pola bagi hasil saat ini : ideal bagi pemilik namun tidak ideal bagi nelayan
2. Simulasi I : ideal bagi pemilik namun bagi nelayan belum cukup walaupun telah layak (*necessary but not sufficient*)
3. Simulasi II : ideal bagi nelayan namun bagi pemilik belum cukup
4. Simulasi III : ideal bagi kedua belah pihak baik nelayan maupun pemilik (*recommended*)
4. Rumusan pola bagi hasil yang optimal adalah 48:52, masing-masing untuk nelayan dan pemilik modal.

DAFTAR REFERENSI

- Hermawan, M. (2006). "Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil". *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Menko Bidang Perekonomian.. *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2011-2025 RI, 2011*. Jakarta.
- Mudzakir Abdul Kohar. (2001). "Optimasi Keuntungan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Di Indonesia (Studi Kasus di PT. Perikanan Samudra Besar, Benoa, Bali)". *Disertasi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nikijuluw V. (2002). *Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional dan Pustaka Cidesindo. Cetakan Pertama. Jakarta. 254 hlm.

KESIMPULAN

1. Keuntungan dalam usaha penangkapan ikan tuna skala kecil di kabupaen SBB dapat dioptimalkan melalui strategi kemitraan dan pola bagi hasil yang optimal.
2. Penerapan strategi kemitraan harus lebih professional dengan ikatan-ikatan kesepakatan yang tegas dan memenuhi prinsip proporsionalitas, berkeadilan, berkeuntungan, dan berkelanjutan.
3. Pola bagi hasil harus dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak secara

- Sugiyono. (2006). *Metoda penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung. Hlm 246
- Supriyadi, A.. (1997). ‘Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Besar Dimasa yang Akan Datang’. Makalah dalam ‘Temu Nasional Modal Ventura : Jakarta.